

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Politik Militer Rusia Pada Masa Boris Yeltsin

Boris Yeltsin memerintah negara federasi Rusia pada tahun 1991 melalui pemilihan umum setelah kehancuran negara Uni Soviet pada masa presiden Mikhail Gorbachev yang gagal membawa konsep demokratis dan keterbukaan yaitu glasnost dan perestroika pada tahun 1991. Pada masa pemerintahan Boris Yeltsin dapat dikatakan sebagai masa transisi dari negara komunis sentralistik menuju negara demokratis. Pemerintahan komunis sebelumnya merupakan warisan dari Lenin yang memerintah Uni Soviet sejak tahun 1917 melalui revolusi Bolshevik, dimana partai komunis sebagai partai penguasa dan menjadi negara yang otoriter.

Sebagai pemerintahan yang otoriter, dalam mempertahankan kekuasaannya Lenin menggunakan cara: 1) pemusatan kekuatan politik hanya pada beberapa orang, dan 2) melakukan teror untuk mencapai tujuan. Pemusatan kekuatan politik dilembagakan dalam sebuah partai tunggal yang dibirokratiskan. Selain itu juga dikembangkan sebuah sistem kendali politik yang berlapis-lapis dan dijalankan dengan ketat dari lapisan atas sampai lapisan bawah. Kegiatan teror diorganisir secara rapi oleh partai menasar kepada pihak yang mengganggu jalannya revolusi. Kekerasan secara kolektif terorganisir menjadi alat utama dalam menyelesaikan masalah-masalah politik, sosial, ekonomi dan budaya. Hal ini mengakibatkan kekejaman-kekejaman kolektif dan individual yang dibangun oleh elit politik partai tunggal yaitu partai komunis dan polisi rahasia. Polisi rahasia melakukan teror dan pembunuhan politik serta terciptanya kelas sosial yang tajam. Namun dengan halus sistem diktator proletariat ini menyebutnya sebagai sistem politik demokrasi rakyat.²¹

20. Brzezinski, Zbigniew. *Kegagalan Besar Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Keduapuluh*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 13-16

Dalam perkembangannya terjadi banyak penolakan pemerintahan sentralistis Lenin yang membuatnya mengundurkan diri dan pada tahun 1991 menunjuk Mikhail Gorbachev sebagai penggantinya. Pada masa pemerintahannya Mikhail Gorbachev menjalankan pembangunan ulang system perekonomian Uni Soviet dengan radikal dengan mengabaikan golongan buruh, birokrasi, inteligen dan militer Soviet. Padahal komponen-komponen tersebut merupakan faktor yang penting untuk pelaksanaan glasnost dan perestroika yang digagasnya. Gorbachev yang komunis tersadar bahwasanya keradikalan didalam paham komunis sangat berlawanan dengan tujuan komunisme sendiri serta menyulitkannya didalam hubungan internasional. Sistem direktorat proletariat sebagai alat untuk mencapai tujuan melalui rekayasa dari atas secara empiris nyata-nyata menimbulkan situasi social politik dan ekonomi berkecenderungan membuat rakyat sengsara. Rezim komunis yang totaliter hanya mampu bertahan dengan mengandalkan teror oleh polisi rahasia dan menebar kebencian pada lawan politiknya. Gorbachev tidak meninggalkan komunis melainkan sedang mengembangkan komunisme sebagai ideopraksis yang bertumpu pada *creative dialectical thought*. Pengembangan tersebut berupa pemurnian komunisme dan pengembangan sesuai tuntutan jaman, pembersihan demokrasi sentralistis yang didasarkan pada *bottom up* bukan *top down* yang dilakukan oleh Lenin.²²

Gorbachev tidak berhasil membawa Uni Soviet ke arah perbaikan, bahkan kesejahteraan rakyat semakin menurun. Perubahan yang semakin kuat diserukan oleh berbagai pihak, berhasil meruntuhkan presiden Mikhail Gorbachev beserta negara Uni Soviet. Lahirlah negara federa Rusia yang dipimpin oleh Boris Yeltsin. Pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, demokrasi yang merupakan salah satu pembaharuan dari Gorbachev tetap dilanjutkan, dan Yeltsin mengadopsi bentuk pemerintahan parlementer sebagai manifestasi demokrasi. Anggota parlemen berasal dari partai-partai yang ada dalam pemerintahan Rusia yang kekuasaannya tidak berpusat pada satu titik

21. Susanto, Dwi & Zainuddin Djafar (ed), *Perubahan Politik di Negara-negara Eropa Timur* (Jakarta; Gramedia, 1990), 6

kekuasaan. Pemerintah pusat membagi kekuasaan menjadi beberapa pemerintahan lokal yang dipimpin seorang gubernur pilihan mereka sendiri.²³

Pada pemerintahan Yeltsin, badan eksekutif dan badan legislatif menggunakan sistem bikameral (dua kamar) yaitu дума negara atau majelis rendah dan dewan federasi atau majelis tinggi. Дума negara bertugas untuk menyusun rancangan undang-undang kemudian diserahkan kepada dewan federasi untuk dikoreksi, jika disetujui maka rancangan undang-undang tersebut diserahkan kepada presiden untuk ditandatangani dan diundangkan.²⁴

Pada pemerintahan Lenin sebagai pembawa komunisme, politisasi borjuis mengalami kejayaan dan mati, diganti politik proletarian, tetapi pada pemerintahan Yeltsin borjuis bangkit kembali dan berubah bentuk jadi Oligarki. Istilah Oligarki muncul dan populer di Rusia dan Ukraina pada tahun 1994, dan terjadi penggeseran semula seperti dikemukakan oleh Aristoteles dimana Oligarki merupakan golongan yang super kaya yang memiliki jaringan politik teramat kuat.²⁵

Oligarki menjadi kekuatan baru dalam politik Rusia akibat penerapan ekonomi pasar secara radikal oleh Yeltsin. Kaum usahawan dengan kepandaianya memutarakan peralatan finansial berkuasa atas sumberdaya-sumberdaya yang strategik di Rusia. Eksistensi oligarki didukung oleh struktur politik yang diakibatkan oleh proses privatisasi aset-aset negara di Rusia, sehingga prosesi perpolitikan dimana mempergunakan komponen demokratik dipengaruhi oligarki.²⁶

Presiden Boris Yeltsin memiliki kekuasaan sangat besar dalam pemerintahannya. Kekuasaan yang sangat besar tersebut dapat dilihat dari kewenangannya untuk membubarkan parlemen jika parlemen tiga kali berturut-turut menolak rencana undang-undang presiden. Yeltsin menggunakan slogan demokrasi demi kepentingan sendiri, Pelanggaran demokrasi juga digencarkan

22. Susanto, Dwi & Zainuddin Djafar (ed), *Perubahan*.7

23. Remington, Thomas F. *The Russian*

24. Aslund, Anders. *Comparative oligarchy: Russia, Ukraine, and the United States*. (Warsawa: *Centrum Analize Spoteczno-Ekonomiecznych*, 2005), 156

25. Aslund, Anders. *Comparative*, 157

melalui pengekan lembaga-lembaga politik negara.²⁷ Kekuasaan Yeltsin yang sangat besar tersebut melemahkan kekuatan badan legislatif karena setiap undang-undang yang diajukan presiden harus disetujui legislatif jika tidak parlemen dibubarkan. Keadaan tersebut juga mengindikasikan pemilihan anggota legislatif tidak ada gunanya karena sebagai perwakilan rakyat tidak dapat menyampaikan aspirasi rakyat. Dalam memaksakan kehendaknya kepada parlemen Yeltsin tidak hanya menggunakan ancaman tetapi juga mengerahkan panser untuk menyerang parlemen.²⁸

Kekuasaan pemerintahan Rusia hanya berada di tangan presiden ini menunjukkan bahwa sudah terjadi sentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan demokrasi yang semula hendak dijalankan oleh Yeltsin dalam memerintah Rusia. Yeltsin menjadi seorang diktator dengan pemerintahannya yang otoriter dan menggunakan militer sebagai senjata utama dalam menyelesaikan masalah dalam pemerintahannya. Hal ini ditunjukkan dengan peristiwa konflik antara parlemen dengan eksekutif di bulan September tahun 1993 dan menghentikan parlemen melalui intervensi militer.²⁹ Awalnya Yeltsin seakan-akan berpihak kepada rakyat sipil dengan membebaskan aset negara dikuasai oleh sipil yang menciptakan kaum oligarki dan kesenjangan sangat lebar pada rakyatnya, pada akhirnya Yeltsin kembali menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan dan kaum oligarki yang berpihak kepadanya.

Setelah terjadinya konflik tersebut Yeltsin membuat referendum baru mengenai konstitusi eksekutif, legislative dan yudikatif yang mulai berlaku tanggal 22 Desember 1993. Perubahan struktur pemerintahan ini diarahkan menuju konsep demokrasi yang sebenarnya.³⁰ Pembentukan badan-badan tersebut terjadi pada tanggal 12 Desember 1993 yang disahkan dalam Konstitusi Federasi Rusia sekaligus menetapkan bentuk negara federasi Rusia

26. Marshall I. Goldman, *The Privatization of Russia: Russian Reforms Goes Awry*, (New York, Routledge, 2003)

27. Marshall I. Goldman, *The Privatization*

28. Sunaryono, Bambang, *Rusia*, 26

29. Sunaryono, Bambang, *Rusia*, 27

dengan sistem pemerintahan presidensiil, dan menerapkan demokrasi dengan pemisahan kekuasaan antara yudikatif, eksekutif dan legislatif sesuai tugasnya masing-masing.³¹

Politik militer yang dijalankan pada masa pemerintahan Yeltsin tidak ubahnya dengan politik militer yang dijalankan pada masa pemerintahan Lenin sebelumnya. Bedanya pada masa Lenin militer digunakan untuk memerangi kelompok-kelompok atau oposisi yang menentangnya, pada masa Yeltsin militer digunakan untuk menyerang parlemen. Yeltsin yang bermaksud memperbaiki negara Rusia dan mewujudkan demokrasi malah terjerumus menjadi diktator dan menempatkan otoritas sipil dibawah militer. Keadaan ini menunjukkan bahwa interaksi sipil-militer negara Rusia pada masa Yeltsin termasuk dalam ranah masyarakat politik, yaitu merupakan salah satu bentuk pertarungan dari kekuatan publik dan politik secara luas termasuk partai politik dan legislatif.³² Sampai pada akhir pemerintahannya Yeltsin belum dapat mewujudkan Rusia sebagai negara demokrasi sepenuhnya dan belum ada supremasi sipil. Negara yang demokratis harus menempatkan militer di bawah otoritas sipil.³³

4.2. Politik Militer Rusia Pada Masa Vladimir Putin

Pada masa pemerintahan Vladimir Putin, Rusia masih berbentuk negara federasi Rusia. Sistem presidensiil pada sistem pemerintahan negara federasi Rusia memperlihatkan dominasi dari seorang presiden. Sebelum menjadi presiden, pada akhir tahun 1999 Putin ditunjuk oleh Yeltsin sebagai *Acting Presiden* yaitu berperan sementara menjalankan tugas dan fungsi seorang presiden sebagai kepala negara Rusia sampai diselenggarakannya pemilihan umum pada bulan Maret tahun 2000.

Vladimir Putin berkuasa selama tiga masa kepresidenan secara penuh, dan satu kali sebagai pengganti Yeltsin ketika mundur jadi presiden, dan satu kali pertukaran presiden dengan perdana menteri yang menandakan dominasi

30. Fahrurodji, A. 2005, *Rusia* 195

31. Stepan, Alfred. *Rethinking*,97

32. Diamond, Larry dan Marc F. Plattner (ed), *Hubungan*.201

kekuatan Putin di negara Rusia. Selama pemerintahannya, Putin melakukan penyesuaian di bidang ekonomi dan menjadikan Rusia sebagai salah satu negara adidaya yang disegani dunia Internasional melalui peningkatan senjata dan teknologi.³⁴

Vladimir Putin selama memimpin negara Rusia terkenal keras dan tegas, siapapun yang berani menentang kebijakannya akan disingkirkan dengan berbagai cara seperti mengucilkan atau menjebloskan ke dalam penjara. Putin mempergunakan demokratis guna mengcover tindakan otoriterismenya yang sangat berbeda dalam paradoksnya sering meneriakkan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Pada kenyataannya militer dan dinas keamanan lebih mendominasi otoritas dibanding sipil.³⁵

Penurunan drastis pada norma demokratis yang substansial sangat terasa pada jaman Putin.³⁶ Didalam langkah-langkahnya Putin menghabisi seluruh oposisinya dan menyatakan perang menyerang oligarki. Golongan oligarki ciptaan Boris Yeltsin diserang oleh Putin menggunakan berbagai cara yang dapat dinilai licik disertai berbagai tekanan.³⁷ Pada akhirnya kalangan super kaya atau kaum oligarki ditumbangkan Putin dan mempertahankan orang-orang yang dipercayainya. Putin memasukan banyak para oligarki ke dalam penjara dan didalam prosesi ajuan kasus mereka terdapat pencurangan pada saat sidanganya.³⁸

Pada era pemerintahan Putin didalam upaya memerintah negara, melakukan perubahan juga revolusi di pada semua lembaga pemerintahan yang berpotensi melawanya. Sepanjang delapan tahunan masa pemerintahan Putin sudah menjadikan Rusia sebagai negara yang dipimpin orang yang otoriter tetapi masih menyebutnya demokratis.³⁹ Tetapi berikutnya tanpa ditutupi Putin melakukan pembatasan serta penggerogotan terhadap struktur dan nilai

33. Fahrurroji, A. 2005, *Rusia*, 198

34. Thompson, John M. *Russia*, 398

35. Thompson, John M. *Russia*, 399

36. Fish, M. Steven. *Democracy*, 17

37. Marshall I. Goldman, *The Privatization*

38. Thompson, John M. *Russia*, 399

nilai demokratik, dengan cepat dan pasti menggantinya dengan struktur otoriter.⁴⁰

Pada masa pemerintahan Vladimir Putin terjadi penurunan, tetap melibatkan peran militer untuk memperkuat kekuasaannya. Misalnya menggunakan militer untuk memerangi lawan politik dan menumbangkan kaum oligarki yang dilakukan secara samar ataupun terang-terangan. Negara demokrasi yang dibentuk oleh Yeltsin, oleh Putin tidak dijalankan sepenuhnya karena pada kenyataannya menggunakan cara-cara diktator dan otoriter. Sekali lagi di masa Putin, supremasi sipil di negara Rusia ditinggalkan. Politik militer yang diterapkan oleh Putin tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan oleh Yeltsin yaitu berhadapan dengan masyarakat sipil. Pada masa Yeltsin militer dijadikan alat untuk memerangi parlemen, di masa Putin militer dijadikan alat untuk memerangi kaum oligarki yang dibentuk Yeltsin. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sipil-militer pada masa Putin termasuk dalam ranah pemerintahan dimana interaksi sipil-militer terpusat pada penguasaan berkelanjutan dan penuh atas alat-alat pemerintahan untuk mengelola sipil dan militer.⁴¹

Apabila dicermati perpolitikan di negara Rusia tidak bisa lepas dari sejarah pemerintahan sebelumnya yang lekat dengan sifat otoriter dan diktator, sehingga seperti sudah menjadi karakteristik budaya politik di Rusia. Karakteristik politik menurut budaya politik rakyat Rusia menunjukkan dalam sistem pemerintahan yang terpusat menggunakan kepemimpinan yang kuat. Budaya politik yang terus berkembang di Rusia cenderung otoritarian, mencari pemimpin yang kuat, menjauhi demokrasi dan menggunakan sistem politik yang tertutup.⁴²

39. Fish, M. Steven. *Democracy*, 23

40. Stepan, Alfred. *Rethinking*, 99

41. Stepan, Alfred. *Rethinking*, 65